



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 April 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI KRIARMONI, SE,S.IP, MM**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **688379**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 6.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , WARISAN Rp. 3.000.000.000
7. Tanah Seluas 2220 m2 di KAB / KOTA KOTA CIREBON , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 550.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA G MATIK Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



4. MOBIL, TOYOTA INNOVA G MATIK Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV 1.5 E Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 60.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 828.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 180.000.000

Sub Total Rp. 8.218.000.000

III. HUTANG Rp. 755.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.463.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.